

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini akan disajikan tinjauan pustaka yang melandasi kerangka pemikiran dan pengajuan hipotesis. Penulisan pada bab ini akan menyajikan tinjauan pustaka sebagai gambaran konsep dasar mengenai variabel yang akan diteliti, dan dilandasi dengan adanya penelitian terdahulu, selanjutnya pada bab ini pula penulis akan membahas mengenai kerangka pemikiran teoritis yang pembahasannya tentang model dan hubungan antar variabel dependen dengan variabel independen, kemudian diiringi dengan hipotesis yang diajukan.

##### **2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan kualitas hidup manusia dan berfungsi untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak.

Setiap dimensi diwakili oleh indikator. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator umur harapan hidup saat lahir. Sementara itu, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah merupakan indikator yang mewakili dimensi pengetahuan. Terakhir, dimensi standar hidup layak Indonesia diwakili

oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. (BPS, Indeks Pembangunan Manusia 2018, 2018).

Indeks Pembangunan Manusia menjadi salah satu indikator yang penting dalam melihat sisi lain dari pembangunan. Manfaat penting IPM antara lain sebagai berikut:

1. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
2. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.
3. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). Pembangunan manusia menurut standar *United Nations Development Program* (UNDP), terdiri dari 4 kriteria, yakni IPM >80 kategori sangat tinggi, IPM 70-79 kategori tinggi. serta IPM 60-79 kategori sedang. Sejak saat itu, IPM secara berkala dipublikasikan setiap tahun dalam suatu Laporan Pembangunan Manusia (*Human Development Report*). Sejak pertama kali diperkenalkan, IPM terus menjadi indikator penting dalam mengukur kemajuan pembangunan manusia.

Berbagai negara mengadopsi konsep pembangunan manusia yang digagas oleh UNDP dan tidak sedikit yang mencoba mengaplikasikan penghitungan IPM

di negaranya. Indonesia turut ambil bagian dalam mengaplikasikan konsep pembangunan manusia yang dinilai lebih relevan dibanding konsep pembangunan konvensional. Indonesia pertama kali menghitung IPM pada tahun 1996. Sejak saat itu, IPM dihitung secara berkala setiap tiga tahun. Namun, sejak 2004 IPM dihitung setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan Kementerian Keuangan dalam menghitung Dana Alokasi Umum (DAU).

Pada tahun 2010, UNDP secara resmi memperkenalkan penghitungan IPM dengan metode yang baru. Metode ini menggunakan indikator baru dalam penghitungan IPM. Indikator angka melek huruf dan gabungan angka partisipasi kasar diganti dengan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Indikator PDB per kapita juga diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Selain itu, penghitungan rata-rata indeks juga dirubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

#### **2.1.1.1 Komponen Indeks Pembangunan Manusia**

##### **1. Indeks Pendidikan (IP)**

Penghitungan indeks pendidikan (IP) mencakup dua indikator yaitu angka melek huruf (LIT) dan rata-rata lama sekolah (MYS). Populasi yang digunakan adalah penduduk berumur 15 tahun keatas karena pada kenyataannya penduduk usia tersebut sudah ada yang berhenti sekolah. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun masih dalam proses sekolah atau akan sekolah sehingga belum pantas untuk rata-rata lama sekolahnya. Kedua indikator pendidikan ini dimunculkan engan harapan dapat mencerminkan tingkat

pengetahuan (cerminan angka LIT), dimana LIT merupakan proporsi penduduk yang memiliki kemampuan baca tulis dalam suatu kelompok penduduk secara keseluruhan. Sedangkan cerminan angka MYS merupakan gambaran terhadap keterampilan yang dimiliki penduduk.

## 2. Indeks Harapan Hidup (Indeks Kesehatan)

Indeks harapan hidup menunjukkan jumlah tahun hidup yang diharapkan dapat dinikmati penduduk suatu wilayah. Dengan menunjukkan informasi mengenai angka kelahiran dan kematian per tahun, variabel tersebut diharapkan akan mencerminkan rata-rata lama hidup sekaligus hidup sehat masyarakat. Sehubungan dengan sulitnya mendapatkan informasi orang yang meninggal pada kurun waktu tertentu, maka untuk menghitung angka harapan hidup digunakan metode tidak langsung. Data dasar yang dibutuhkan dalam metode ini rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak masih hidup dari wanita pernah kawin. Secara singkat, proses perhitungan angka harapan hidup ini disediakan oleh program mortpak. Untuk mendapatkan indeks harapan hidup dengan cara menstandarkan angka harapan hidup terhadap nilai maksimum dan minimumnya.

## 3. Indeks Daya Beli (Indeks Pendapatan)

Kemampuan daya beli penduduk atau *Purching Power Parity* (PPP) adalah suatu indikator yang dipakai untuk melihat kondisi ekonomi masyarakat dalam mengukur indeks pembangunan manusia. Kemampuan daya beli ini lebih menggambarkan kemampuan masyarakat secara ekonomi dalam mencukupi kebutuhan konsumsinya, dan sangat jauh berbeda dengan PDRB perkapita atau yang disebut dengan pendapatan perkapita. Untuk mengukur standar hidup layak,

data PDRB perkapita tidak bisa digunakan karena tidak tepat untuk mengukur kemampuan daya beli penduduk. Oleh karena itu, perhitungan daya beli penduduk menggunakan konsumsi perkapita yang akan disesuaikan. Setelah dilakukan perhitungan pengeluaran perkapita setahun yang disesuaikan.

### 2.1.1.2 Menghitung Indeks Komponen

#### 1. Metode Lama

Sebelum penghitungan IPM, setiap komponen harus dihitung indeksinya.

Formula yang digunakan sebagai berikut;

$$\text{indeks } X_{(i,j)} = \frac{(X_{(i,j)} - X_{(i-\min)})}{(X_{(i-\max)} - X_{(i-\min)})}$$

Dimana :

$$\begin{aligned} X_{(i,j)} &= \text{Indeks komponen ke-}i \text{ dari daerah } j \\ X_{(i-\min)} &= \text{Nilai minimum dari } X_i \\ X_{(i-\max)} &= \text{Nilai maksimum dari } X_i \end{aligned}$$

Selanjutnya IPM dapat dihitung sebagai berikut:

$$IPM_j = \frac{1}{3} \sum_j \text{Indeks } X_{(i,j)}$$

Dimana :

$$\begin{aligned} \text{Indeks } X_{(i,j)} &= \text{Indeks komponen IPM ke } i \text{ untuk wilayah ke } j; \\ &\quad i = 1, 2, 3 \\ &\quad j = 1, 2, \dots, k \text{ wilayah} \end{aligned}$$

#### 2. Metode Baru

Setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut.

### Dimensi Kesehatan

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

### Dimensi Pendidikan

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

### Dimensi Pengeluaran

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$$

### Menghitung IPM

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$

### 2.1.2 Pengangguran

Dalam standar yang sudah di tentukan secara internasional, yang dimaksudkan dengan pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Orang yang menganggur tersebut dapat didefinisikan orang yang tidak bekerja dan secara aktif mencari pekerjaan selama 4 minggu sebelumnya, sedang menunggu panggilan kembali untuk suatu pekerjaan setelah diberhentikan atau sedang menunggu untuk laporan atas pekerjaan yang baru dalam waktu 4 minggu. Pengangguran Terbuka (*open unemployment*) adalah bagian dari angkatan kerja yang sekarang ini tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan. TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka, terdiri dari:

1. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan
2. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha
3. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan
4. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja

Pengangguran akan mengakibatkan berkurangnya pendapatan masyarakat dan tentunya mengurangi tingkat kemakmuran dan kesejahteraan yang telah di capai seseorang karena tidak dapat memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan untuk kebutuhannya (Sadono Sukirno). Menganggur dibagi menjadi dalam dua kelompok yang pertama, setengah menganggur kentara (*visible unemployment*) yakni mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu dan yang

kedua, setengah menganggur tidak kentara (*invisible unemployment*) yaitu mereka yang produktivitas kerja dan pendapatannya rendah.

### **2.1.2.1 Jenis Pengangguran dan Penyebabnya**

Pengangguran dapat diklasifikasikan menurut berbagai cara misalnya menurut wilayah geografis, jenis pekerjaan dan alasan mengapa orang tersebut menganggur. Berikut jenis pengangguran menurut sifat dan penyebabnya :

1. Pengangguran Friksional adalah perubahan dalam komposisi seluruh permintaan dan oleh karena masuknya kedalam pasar tenaga kerja para pencari kerja pertama kalinya yang informasinya tidak sempurna dan membutuhkan biaya modal.
2. Pengangguran Struktural terjadi karena adanya perubahan dalam struktural komposisi perekonomian. Yang dimaksud dengan pengangguran struktural adalah pengangguran yang disebabkan karena ketidakcocokan antara struktur para pencari kerja sehubungan dengan keterampilan, bidang keahlian, maupun daerah lokasi dengan struktur permintaan tenaga kerja yang belum terisi.
3. Pengangguran Siklis terjadi karena kurangnya permintaan. Pengangguran ini terjadi apabila pada tingkat upah dan harga yang berlaku, tingkat permintaan tenaga kerja secara keseluruhan lebih rendah dibandingkan dengan jumlah pekerja yang menawarkan tenaganya.
4. Pengangguran Musiman adalah pengangguran yang terjadi pada waktu-waktu tertentu dalam satu tahun. Pengangguran musiman bersifat sementara saja dan berlaku dalam waktu-waktu tertentu.

5. Pengangguran Sukarela yaitu pengangguran yang terjadi kalau ada pekerjaan yang tersedia, tetapi orang yang menganggur tidak bersedia menerimanya pada tingkat upah yang berlaku untuk pekerjaan tersebut.

Faktor faktor yang mempengaruhi pengangguran yaitu jumlah pencari kerja lebih besar dibanding jumlah peluang kerja yang tersedia, kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar kerja, masih banyaknya anak putus sekolah dan lulus sekolah yang tidak terserap di dunia kerja karena tidak memiliki keterampilan yang memadai.

#### **2.1.2.2 Rumus Menghitung Pengangguran**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ini mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Rumus untuk menghitung TPT sebagai berikut :

$$TPT = PP/PAK \times 100\%$$

Keterangan:

TPT : Tingkat pengangguran terbuka (%)

PP : Jumlah pengangguran (orang)

PAK : Jumlah angkatan kerja (orang)

#### **2.1.3 Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan situasi di mana individu atau suatu rumah tangga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar sandang pangan dan papan. Kondisi ini tidak serta merta akibat dari malas bekerja, terdapat faktor sosial ekonomi yang melatarbelakangi situasi ini. Menurut (*United Nations Development Programme* (UNDP), 2009), kemiskinan adalah suatu situasi

dimana seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan pendukungnya kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan atau untuk keluar dari kerentanan.

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (baik makanan maupun nonmakanan) (Badan Pusat Statistik, 2018). Kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.(Surjono Sukanto).

Kemiskinan adalah kondisi ketika seorang individu tidak dapat mempertahankan skala hidupnya yang cukup tinggi untuk dapat memberikan efisiensi fisik serta mental, agar memungkinkan dirinya dan keluarganya dapat menjalankan fungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan standar masyarakat yang baik. Karena pendapatan yang tidak memadai ataupun pengeluaran yang dilakukan dengan tidak bijaksana.(Gillin dan Gillin).

#### **2.1.3.1 Faktor-faktor Terjadinya Kemiskinan**

Terdapat 5 faktor yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan yaitu :

##### **1. Masyarakat Pengangguran Meningkat**

Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan lapangan kerja yang ada di suatu negara menjadi terbatas. Sehingga, angka pengangguran di daerah tersebut akan meningkat. Semakin banyak masyarakat yang pengangguran, maka angka kemiskinan pun akan meningkat.

## 2. Laju Pertumbuhan Penduduk yang Tinggi

Angka kelahiran yang tinggi di suatu daerah dapat mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk suatu negara menjadi lebih besar. Sehingga, dapat menyebabkan lapangan pekerjaan yang tersedia menjadi terbatas untuk dapat merekrut masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Selain itu, apabila laju pertumbuhan penduduk tinggi tetapi tidak sebanding dengan laju pertumbuhan ekonomi, maka akan mengakibatkan angka kemiskinan semakin meningkat.

## 3. Pendidikan yang Rendah

Individu yang memiliki pendidikan yang rendah, cenderung tidak memiliki keterampilan, wawasan maupun pengetahuan yang memadai untuk mendapatkan pekerjaan. Sehingga, masyarakat yang berpendidikan rendah tidak dapat bersaing dengan masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi di dunia kerja maupun usaha. Hal inilah yang membuat masyarakat berpendidikan rendah kalah saing dan membuat angka pengangguran serta kemiskinan menjadi bertambah.

## 4. Distribusi Pendapatan yang Tidak Merata

Distribusi pendapatan yang tidak merata dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan pada pola kepemilikan sumber daya. Umumnya, masyarakat yang memiliki sumber daya terbatas serta rendah umumnya berada di bawah garis kemiskinan.

## 5. Terjadi Bencana Alam

Bencana alam dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kemiskinan yang tidak dapat dihindari. Bencana alam seperti banjir, tanah longsor maupun tsunami dapat menimbulkan kerusakan pada infrastruktur serta kerusakan psikologis

masyarakat yang tertimpa bencana. Selain itu, bencana alam dapat menjadi penyebab kemiskinan, karena masyarakat yang terdampak bencana tersebut akan kehilangan harta bendanya.

### **2.1.3.2 Jenis-jenis Kemiskinan**

Berdasarkan kondisi kemiskinan yang dipandang sebagai bentuk permasalahan multidimensional, kemiskinan memiliki 4 bentuk. Menurut Suryawati (2004:118) dalam jurnal (Di et al., 2018) berdasarkan kondisi kemiskinan terdapat empat bentuk kemiskinan yaitu::

#### **1. Kemiskinan Absolut**

Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi di mana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Garis kemiskinan diartikan sebagai pengeluaran rata-rata atau konsumsi rata-rata untuk kebutuhan pokok berkaitan dengan pemenuhan standar kesejahteraan. Bentuk kemiskinan absolut ini paling banyak dipakai sebagai konsep untuk menentukan atau mendefinisikan kriteria seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin.

#### **2. Kemiskinan Relatif**

Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan. Daerah-daerah yang belum terjangkau oleh program-program pembangunan ini dikenal dengan istilah daerah tertinggal.

### 3. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan seperti ini juga terkadang memiliki unsur diskriminatif. Bentuk kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang paling banyak mendapatkan perhatian di bidang ilmu sosial terutama di kalangan negaranegara pemberi bantuan/pinjaman seperti Bank Dunia, IMF, dan Bank Pembangunan Asia.

### 4. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup. Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap malas, pemboros atau tidak pernah hemat, kurang kreatif, dan relatif pula bergantung pada pihak lain.

#### **2.1.3.3 Aspek dan Kriteria Kemiskinan**

Kementerian Sosial telah menetapkan 5 aspek dan 9 kriteria kemiskinan dalam menentukan seseorang layak atau tidak masuk ke dalam data kemiskinan (DTKS). Maka secara otomatis, 5 aspek dan 9 kriteria kemiskinan ini menggantikan 14 kriteria kemiskinan yang berlaku sebelumnya. Lima aspek yaitu tersebut tempat tinggal, pekerjaan, pangan, sandang dan papan. Dari 5 aspek di atas, dijabarkan menjadi 9 kriteria kemiskinan, yang meliputi:

1. Tempat berteduh/tinggal sehari-hari
2. Status pekerjaan
3. Kekhawatiran pemenuhan kebutuhan pangan
4. Pengeluaran pangan lebih dari 70 persen total pengeluaran
5. Pengeluaran untuk pakaian.
6. Sebagian besar lantai tempat tinggal terbuat dari tanah.
7. Sebagian besar dinding terbuat dari bambu, kawat, atau kayu.
8. Kepemilikan fasilitas buang air kecil atau besar.
9. Sumber penerangan dari listrik dari perusahaan listrik negara 450 watt atau bukan listrik.

#### **2.1.3.4 Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Kemiskinan**

Dalam upaya menekan kemiskinan ini pemerintah telah membuat berbagai kebijakan dalam mengatasi kemiskinan, kebijakan tersebut sebagai berikut :

##### **1. Program Indonesia Pintar (PIP)**

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik usia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membantu biaya personal pendidikan. PIP bertujuan untuk membantu biaya personal pendidikan peserta didik dalam rangka:meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, mencegah peserta

didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi dan/atau menarik siswa putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah dan satuan pendidikan nonformal.

## 2. Program Indonesia Sehat (PIS)

Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga merupakan program yang diselenggarakan oleh KEMENKES RI untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berperilaku sehat, hidup dalam lingkungan yang sehat, serta sadar akan pentingnya kesehatan. Program ini diharapkan juga mampu menyiasati permasalahan akses ke pelayanan kesehatan yang masih sulit dijangkau di beberapa tempat.

## 3. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya.. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan *center of*

*excellence* penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

#### 4. Beras Sejahtera (Rastra)

Bantuan Sosial Beras Sejahtera yang selanjutnya disebut Bansos Rastra adalah Bantuan Sosial yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam bentuk beras dan disalurkan setiap bulannya. Penerima Bansos Rastra sendiri dipersyaratkan sebagai KPM yang tercantum dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Dengan diturunkannya Bansos Rastra kepada masyarakat miskin, Pemerintah berharap agar Bansos dalam bentuk beras masing-masing paling sedikit 10 kilogram per KPM ini dapat mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian khusus kebutuhan di sektor pangan dalam jangka waktu tertentu tanpa dikenakan biaya tebus.

Dengan hal tersebut diharapkan menghasilkan beberapa manfaat diantaranya: dapat meningkatkan ketahanan pangan di tingkat KPM Bansos Rastra sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, serta dapat meningkatkan akses pangan untuk KPM Bansos Rastra dengan tersedianya beras di titik distribusi yang disalurkan tanpa dikenakan biaya kepada KPM Bansos Rastra.

#### 5. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan Pangan Non Tunai disingkat BPNT merupakan bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai atau Kartu Sembako, yang diberikan pemerintah pada masyarakat kurang mampu setiap bulan. Bantuan ini disalurkan melalui

mekanisme akun elektronik, sehingga kartu sembako hanya bisa digunakan untuk membeli bahan pangan di warung yang bekerjasama dengan pihak bank.

#### 6. Program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS)

Program Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) merupakan program untuk menangani kesulitan akses lahan pertanian yang menjadi salah satu penyebab miskinnya masyarakat pedesaan. Menurut pemerintah, ketiadaan lahan menyulitkan masyarakat desa mencari penghidupan dan memaksa mereka pindah ke kota. Namun penduduk desa dengan tingkat pendidikan dan ketrampilan yang rendah sulit untuk berkompetisi mendapatkan pekerjaan di kota. Dalam program ini pemerintah mencanangkan program perhutanan sosial, yaitu pemberian izin pengelolaan kawasan hutan produksi negara seluas 12,7 juta hektar kepada petani atau hampir seluas Pulau Jawa yaitu 12,8 juta hektar.

#### 2.1.3.5 Mengukur Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh *Worldbank*. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

## 1. Garis Kemiskinan (GK)

Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan non-makanan berupa perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

Rumus Penghitungan :

$$\mathbf{GK = GKM + GKNM}$$

Keterangan:

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makan

Rumus Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah :

$$GKM_{jp}^* = \sum_{k=1}^{52} P_{jkp} \cdot Q_{jkp} = \sum_{k=1}^{52} V_{jkp}$$

Dimana :

$GKM_{jp}^*$  : Garis Kemiskinan Makanan daerah  $j$  (sebelum disetarakan menjadi 2100 kilokalori) provinsi

$p$ .

$P_{jkp}$  : Rata-rata harga komoditi  $k$  di daerah  $j$  dan provinsi  $p$ .

$Q_{jkp}$  : Rata-rata kuantitas komoditi  $k$  yang dikonsumsi di daerah  $j$  di provinsi  $p$ .

$V_{jkp}$  : Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi  $k$  di daerah  $j$  provinsi  $p$ .

$j$  : Daerah (perkotaan atau pedesaan).

$p$  : Provinsi ke- $p$ .

Selanjutnya GKM $_j$  tersebut disetarakan dengan 2100 kilokalori dengan mengalikan 2100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah  $j$  dari penduduk referensi, sehingga :

$$\overline{HK}_{jp} = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{jkp}}{\sum_{k=1}^{52} K_{jkp}}$$

Dimana :

$K_{jkp}$  : Kalori dari komoditi  $k$  di daerah  $j$  di provinsi  $p$

$\overline{HK}_{jp}$  : Harga rata-rata kalori di daerah  $j$  di provinsi  $p$

Rumus Garis Kemiskinan Non-Makanan sebagai berikut :

$$GKNM_{jp} = \sum_{k=1}^n r_{kj} V_{kjp}$$

$GKNM_{jp}$  : Pengeluaran minimum non-makanan atau garis kemiskinan non-makanan daerah  $j$  dan provinsi  $p$

$V_{kjp}$  : Nilai pengeluaran per komoditi/sub-kelompok non-makanan daerah  $j$  dan provinsi  $p$

$r_{kj}$  : Rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok non-makanan  $k$  menurut daerah (hasil SPKKD 2004) dan daerah  $j$

$k$  : Jenis komoditi non-makanan terpilih

$j$  : Daerah (Perkotaan atau pedesaan)

$p$  : Provinsi ke- $p$

## 2. Persentase Penduduk

*Head Count Index* (HCI-P0) adalah persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).

Rumus Penghitungan :

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Keterangan:

$\alpha = 0$

$z$  = garis kemiskinan.

$y_i$  = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ( $i=1, 2, 3, \dots, q$ ),  $y_i < z$

$q$  = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

$n$  = jumlah penduduk.

## 3. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-PI*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Rumus Penghitungan :

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Keterangan:

$$\alpha = 1$$

$z$  = garis kemiskinan.

$y_i$  = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ( $i=1, 2, 3, \dots, q$ ),  $y_i < z$

$q$  = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

$n$  = jumlah penduduk.

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Rumus Penghitungan :

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Keterangan:

$$\alpha = 2$$

$z$  = garis kemiskinan.

$y_i$  = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ( $i=1, 2, 3, \dots, q$ ),  $y_i < z$

$q$  = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

$n$  = jumlah penduduk.

Dalam mengukur tingkat ketimpangan di Indonesia, BPS menggunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Susenas. *Gini ratio* adalah salah satu ukuran ketimpangan pengeluaran yang digunakan. Nilai *gini ratio* berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai *gini ratio* yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.

#### **2.1.4 Stunting**

*Stunting* merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. *Stunting* terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun. Kekurangan gizi pada usia dini meningkatkan angka kematian bayi dan anak, menyebabkan penderitanya mudah sakit dan memiliki postur tubuh tak maksimal saat dewasa. Kemampuan kognitif para penderita juga berkurang, sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi jangka panjang bagi Indonesia.

*Stunting* adalah gangguan tumbuh kembang yang dialami anak akibat gizi buruk, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai (*World Health Organization*, 2015). Faktor penyebab stunting dapat dikelompokkan menjadi penyebab langsung dan tidak langsung. Praktik pemberian kolostrum dan ASI eksklusif, pola konsumsi anak, dan penyakit infeksi yang diderita anak menjadi faktor penyebab langsung yang mempengaruhi status gizi anak dan bisa berdampak pada stunting. Sedangkan penyebab tidak langsungnya adalah akses dan ketersediaan bahan makanan serta sanitasi dan kesehatan lingkungan (Cohort, 2020). Pemantauan pertumbuhan anak biasanya dilakukan dengan memplot berat

badan dan tinggi badan ke dalam suatu kurva pertumbuhan. Seorang anak dikatakan pendek atau *stunting* jika tinggi badan atau panjang badan menurut usia lebih dari dua standar deviasi di bawah median kurve standar pertumbuhan anak WHO.

#### **2.1.4.1 Faktor-faktor Penyebab *Stunting***

Beberapa faktor yang menjadi penyebab *stunting* dapat digambarkan sebagai berikut:

##### **1. Praktek Pengasuhan Yang Kurang Baik**

Kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, serta setelah ibu melahirkan. Beberapa fakta dan informasi yang ada menunjukkan bahwa 60% dari anak usia 0-6 bulan tidak mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif, dan 2 dari 3 anak usia 0-24 bulan tidak menerima Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI). MPASI diberikan/mulai diperkenalkan ketika balita berusia diatas 6 bulan. Selain berfungsi untuk mengenalkan jenis makan- an baru pada bayi, MPASI juga dapat mencukupi kebutuhan nutrisi tubuh bayi yang tidak lagi dapat disokong oleh ASI, serta membentuk daya tahan tubuh dan perkembangan sistem imunologis anak terhadap makanan maupun minuman.

##### **2. Masih Terbatasnya Layanan Kesehatan**

Terbatasnya layanan kesehatan dan layanan Antenatal Care (ANC) atau pelayanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan, Post Natal Care dan pembelajaran dini yang berkualitas. Fakta yang terjadi dilapangan adalah 2 dari 3 ibu hamil belum mengkonsumsi suplemen zat besi yang memadai serta masih

terbatasnya akses ke layanan pembelajaran dini yang berkualitas (baru 1 dari 3 anak usia 3-6 tahun belum terdaftar di layanan PAUD/Pendidikan Anak Usia Dini).

### 3. Kurangnya Makanan Bergizi

Masih kurangnya akses rumah tangga / keluarga ke makanan bergizi. Penyebabnya karena harga makanan bergizi di Indonesia masih tergolong mahal.

### 4. Kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi.

Data yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa 1 dari 5 rumah tangga di Indonesia masih buang air besar (BAB) di ruang terbuka, serta 1 dari 3 rumah tangga belum memiliki akses ke air minum bersih.

*Stunting* adalah kondisi gangguan pertumbuhan yang tidak bisa dikembalikan seperti semula. Ketika seorang anak sudah *stunting* atau pendek sejak masih balita, maka pertumbuhannya akan terus lambat hingga dewasa. Saat puber, tidak dapat mencapai pertumbuhan maksimal akibat sudah terkena *stunting* di waktu kecil. Walaupun diberikan makanan yang kaya akan gizi, namun tetap saja pertumbuhannya tidak dapat maksimal.

#### **2.1.4.2 Dampak *Stunting***

Dampak dari terjadinya *stunting* pada balita terdapat 2 jenis yaitu dampak jangka pendek dan jangka panjang, untuk jangka pendek adalah terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme dalam tubuh, sedangkan untuk jangka panjang akibat buruk yang dapat ditimbulkan adalah menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit, dan resiko tinggi untuk

munculnya penyakit diabetes, kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas pada usia tua. Kesemuanya itu akan menurunkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, produktifitas, dan daya saing bangsa.

#### **2.1.4.3 Upaya Pemerintah dalam Mengatasi *Stunting***

Mengacu Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, ada 13 kementerian yang sesuai tugas pokok dan fungsinya melakukan pencegahan *stunting*. Upaya pemerintah mencegah *stunting* dilakukan melalui program, pertama Peningkatan Gizi Masyarakat melalui program Pemberian makanan tambahan (PMT) untuk meningkatkan status gizi anak. Kedua, Sanitasi berbasis Lingkungan melalui peningkatan kualitas sanitas lingkungan di 250 desa pada 60 Kabupaten/Kota, dengan target prioritas pada desa yang tingkat prevalensi *stunting*nya tinggi. Ketiga, anggaran setiap desa dalam program ini sebesar 100 juta, dengan target minimal 20 KK terlayani jamban individu sehat dan cuci tangan pakai sabun dan kebijakan yang menyasar kepada warga miskin agar ada perubahan perilaku. Keempat, pembangunan infrastruktur air minum untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, terutama mencegah *stunting*

#### **2.1.5 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ini dapat dijadikan bahan perbandingan ataupun kajian terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis, penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti Dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penelitian dari Alayda. F., Sodik,J., & Nuryadin.D. (2022).dengan judul “Determinan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 - 2020”	IPM	PDRB per kapita, investasi, belanja kesehatan	Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara PDRB per kapita, investasi, dan belanja pemerintah bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Sedangkan secara parsial PDRB per kapita, investasi, dan belanja pemerintah bidang kesehatan berpengaruh positif signifikan terhadap IPM di 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2020.	Sibatik jurnal. Volume 1 no, 6-mei 2022. E-ISSN: 2809 – 8544
2	Penelitian dari Kiha et al., (2021) dengan judul “Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Belu”	Pengangguran, Kemiskinan, IPM	Jumlah Penduduk	Jumlah penduduk dan pengangguran terhadap kemiskinan sebesar 0,790 yang artinya mempunyai hubungan yang kuat. Jumlah penduduk, pengangguran dan kemiskinan terhadap IPM sebesar 0,766 yang artinya mempunyai hubungan yang kuat. Dari hasil analisis koefisien determinan R <sup>2</sup> di peroleh nilai sebesar 0,559 hal ini artinya besarnya variabel IPM dipengaruhi oleh variabel jumlah penduduk , pengangguran dan kemiskinan sebesar 55,9% dan sisanya sebesar 44,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasuki dalam penelitian.	Intelektiva: jurnal ekonomi, sosial dan humaniora E-ISSN 2686 5661 Vol.2 No. 07- Februari 2021

3	<p>Penelitian dari Ranadhani et al., (2021) dengan judul “Pengaruh Tingkat Pengangguran, Tingkat Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2008-2019”</p>	<p>Tingkat Pengangguran, Tingkat Kemiskinan, IPM</p>	<p>Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan</p>	<p>Tingkat Pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Tingkat Kemiskinan berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap IPM. Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh dan signifikan terhadap IPM. Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap IPM. Belanja Pemerintah Bidang Kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Tingkat Pengangguran, Tingkat Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan, dan Belanja Pemerintah Bidang Kesehatan berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap IPM di Provinsi Sulawesi Utara</p>	<p>Jurnal berkala ilmiah efisiensi. Volume 21 no. 02 september 2021</p>
4	<p>Penelitian dari Bahriyah &amp; Primandhana (2022) dengan judul “Pengaruh Tingkat Pengangguran, Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap IPM di Kabupaten Gresik”</p>	<p>Tingkat Pengangguran, Kemiskinan, IPM</p>	<p>Pertumbuhan Ekonomi</p>	<p>Secara parsial menunjukkan bahwa variabel pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM, sedangkan untuk variabel kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang memiliki pengaruh negatif dan signifikan berpengaruh pada IPM . Sementara itu, secara bersamaan tingkat pengangguran, kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama mempengaruhi IPM di Kabupaten Gresik periode 2011-2020.</p>	<p>Jurnal ekombis - Vol. 8 No. 1 April 2022 Jurnal Ekonomi dan Bisnis ISSN (Print) 2355-0627 ISSN (Online) 2355-097X</p>

5	Penelitian dari Fadhilah et al., (2022) dengan judul “Analisis Pengaruh Prevelansi <i>Stunting</i> , Kemiskinan, dan Peran ASI Eksklusif Terhadap Indeks Pembangunan Manusia “	Kemiskinan, <i>Stunting</i> , IPM	ASI Eksklusif	Hasil uji regresi menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara <i>stunting</i> terhadap IPM. Kemiskinan dan peran ASI eksklusif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM di Indonesia.	Vol. 1 No. 1 (2022): Prosding seminar nasional masyarakat tangguh
6	Penelitian dari Dewi et al., (2021) dengan judul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bojonegoro”	Pengangguran, Kemiskinan, IPM	Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IPM Kabupaten Bojonegoro. Pengangguran belum mampu mempengaruhi secara signifikan terhadap IPM di Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan kemiskinan dapat secara signifikan mempengaruhi IPM di Kabupaten Bojonegoro.	Syntax Idea: p-ISSN:2684-6853 e-ISSN:2684-883X Vol.3, No.4, april 2021
7	Penelitian dari Faizin,M(2021) dengan judul “Pengaruh Upah Minimum, Kemiskinan dan Pengangguran Pada IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur”	Kemiskinan, Pengangguran, IPM	Upah Minimum	Secara parsial, upah minimum memiliki pengaruh yang positif dan signifikan, kemiskinan memiliki pengaruh yang negatif namun tidak signifikan, dan pengangguran memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan, terhadap IPM. Secara simultan, hasil penelitian menemukan upah minimum, kemiskinan dan pengangguran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap IPM	Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis Volume 12, Nomor 2, Juli 2021 P-ISSN 2089-1989 E-ISSN 2614-1523

8	Penelitian dari Candrawati et al., (2020) dengan judul “Dampak Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Barat”	Pengangguran, Kemiskinan, IPM	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran dan laju pertumbuhan ekonomi semuanya berdampak pada IPM. Tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi berdampak negatif pada IPM. Pengangguran terbuka memiliki pengaruh besar terhadap IPM	Jurnal studi bisnis dan administrasi Vol. 3 No. 2 2020 ISSN:2620-794X (Online) ISSN:2621-2692 (Cetak)
9	Penelitian dari Theogive et al.,(2020) dengan judul “ Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara Tahun (2005 – 2019)”	IPM, Kemiskinan	PDRB, Jumlah Penduduk	PDRB, Jumlah Penduduk dan Tingkat Kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap IPM di Provinsi Sulawesi Utara. Secara parsial PDRB, Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap IPM di Provinsi Sulawesi Utara. Secara parsial Tingkat Kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM di Provinsi Sulawesi Utara	Jurnal berkala ilmiah efisiensi. Volume 20 No. 03 Tahun 2020
10	Penelitian dari Verawaty & Salwa (2022) dengan judul “Pengaruh PAD, Dana Perimbangan SiLPA, Kemiskinan dan Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan)”	Pengangguran, Kemiskinan, IPM	Dana Perimbangan, Belanja Modal	PAD dan Pengangguran berpengaruh signifikan positif terhadap IPM. DAU, DAK, DBH, SiLPA, Kemiskinan tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap IPM. DAK, DBH, Kemiskinan berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal dan PAD berpengaruh signifikan negatif terhadap Belanja modal. DAU SiLPA, Pengangguran tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap Belanja modal namun Belanja Modal tidak mengintervensi seluruh variabel penelitian.	Jurnal bina akuntansi. Januari 2023. Vol,10 no,1. Hal 37-55

- |    |  |                 |   |   |  |
|----|--|-----------------|---|---|--|
| 11 | Penelitian dari Fajri , R.H.(2021) dengan judul “Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau” | IPM, Kemiskinan | Angka Harapan Hidup, Rata – Rata Lama Sekolah | PDRB dan Jumlah penduduk miskin berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap IPM. Angka Harapan Hidup berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM. Rata Lama Sekolah Berpengaruh Positif dan signifikan terhadap IPM. | <i>Economics, accounting and business Journal, 1(1), 212-222. Vol,1 no, 1 (2021)</i> |
|----|--|-----------------|---|---|--|

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah konsep untuk mengungkapkan dan menentukan persepsi dan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti dengan teori-teori yang telah dipaparkan dalam tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu. Pada penelitian yang dilakukan penulis relatif berbeda dengan penelitian sebelumnya. Garis besar penelitian ini yaitu melihat hubungan antara pengangguran, kemiskinan, stunting, terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Barat, Periode 2018-2021.

### 2.2.1 Hubungan Pengangguran Dengan IPM

Menurut Todaro (2000) dalam jurnal (Ramadhan, 2018), bahwa pembangunan manusia merupakan tujuan pembangunan itu sendiri. Pembangunan manusia memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern untuk mengembangkan kapasitasnya agar tercipta kesempatan kerja untuk mengurangi jumlah pengangguran dan pada akhirnya akan tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pembangunan manusia yang diukur melalui besarnya nilai IPM akan berdampak pada rendahnya tingkat pengangguran di suatu wilayah.

(Meydiasari & Soejoto, 2017) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Distribusi Pendapatan, Tingkat Pengangguran, dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap IPM di Indonesia” hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel distribusi pendapatan dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap IPM. Sedangkan variabel tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM.

Berdasarkan penelitian (Meydiasari & Soejoto, 2017) pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ipm, yang berarti jika pengangguran terus meningkat maka akan membuat IPM menjadi turun.

### **2.2.2 Hubungan Kemiskinan Dengan IPM**

Kemiskinan merupakan salah satu indikator yang berpengaruh terhadap IPM. Menurut *World Bank* (2015), dalam definisi kemiskinan ialah kemiskinan itu merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti tidak dapat memenuhi kesehatan, standar hidup layak, kebebasan, harga diri, dan rasa dihormati seperti orang lain. Kemiskinan menurut (Anita Ramadona, Riswan, 2019) merupakan keadaan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya seperti sandang, pangan dan papan atau dengan kata lain hilangnya kesejahteraan. Menurut (Winarti, 2014) didalam suatu lingkaran setan kemiskinan terdapat tiga penyebab utama seseorang menjadi miskin yaitu; (1) rendahnya tingkat kesehatan; (2) rendahnya pendapatan; dan (3) rendahnya tingkat pendidikan.

(Sulistio Mirza, 2012) melakukan penelitian yang berjudul “ Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah tahun 2006-2009” hasil regresi panel menunjukkan kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM dan Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Sulistio Mirza, 2012) bahwa kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Oleh karena itu, jika masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan seperti, sandang, pangan dan papan akan membuat indeks pembangunan manusia menjadi turun.

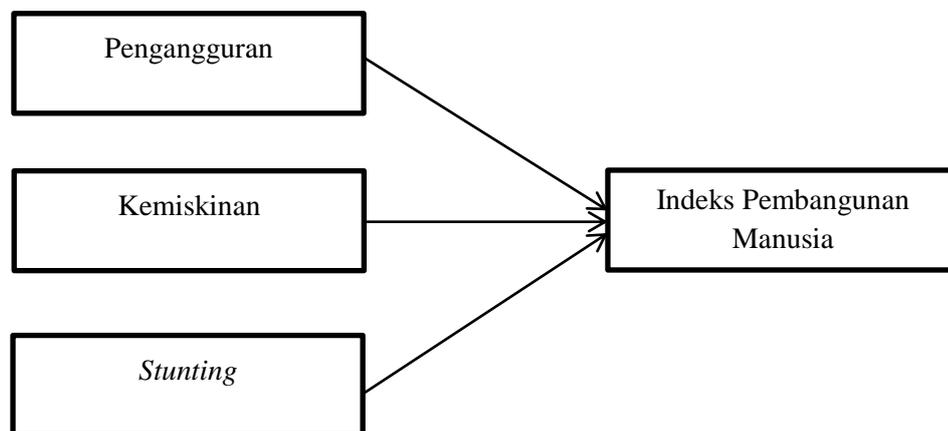
### **2.2.3 Hubungan *Stunting* Dengan IPM**

*Stunting* adalah gangguan tumbuh kembang yang dialami anak akibat gizi buruk, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai (World Health Organization, 2015). Pada pertumbuhan penduduk, *stunting* bisa menurunkan produktivitas SDM. Ini tecermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia di ASEAN masih lebih rendah dari pada Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan setara dengan Vietnam (UNDP, 2018).

(Fadhilah et al., 2022) melakukan penelitian “Analisis Pengaruh Prevalansi *Stunting*, Kemiskinan, dan Peran ASI Eksklusif Terhadap Indeks Pembangunan Manusia” hasil uji regresi menunjukkan bahwa variabel *stunting* memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM . Kemiskinan dan peran ASI eksklusif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Indonesia.

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam menentukan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Fadhilah et al., 2022) menunjukkan bahwa stunting memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Oleh karena itu, jika balita mengalami pertumbuhan yang stunting akan berpengaruh pada SDM dimana akan terlihat pada indeks pemabangunan manusia yang rendah.



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

### 2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Arikunto, 1996:62).

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diduga Pengangguran, Kemiskinan dan *Stunting* secara parsial berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2021.

2. Diduga Pengangguran, Kemiskinan dan Stunting secara bersama-sama berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2021.